

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 18 TAHUN 2015 SERI E.13

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2015**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2015, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1, Seri A.1);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri A.1);
18. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 902/Kep.838-Pemb/2014 tentang Penetapan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
4. Kinerja satuan kerja perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan satuan kerja perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Cirebon :

- a. meningkatnya angka melek huruf Al-Qur'an;
- b. meningkatnya jumlah siswa yang hafal juz'amma;
- c. meningkatnya jumlah DKM yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji;
- d. meningkatnya jumlah penghafal Qur'an;
- e. meningkatnya prestasi lomba keagamaan tingkat Provinsi Jawa Barat;
- f. meningkatnya indeks pendidikan;
- g. meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);
- h. meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- i. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;
- j. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD;
- k. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP;
- l. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP;
- m. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA;
- n. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA;
- o. meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah;
- p. meningkatnya angka harapan hidup;
- q. menurunnya angka kematian bayi;
- r. menurunnya persentase balita gizi buruk;
- s. meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar;
- t. meningkatnya rasio rumah sakit per-satuan penduduk;
- u. meningkatnya rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk;
- v. meningkatnya jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan;
- w. meningkatnya rasio dokter per-satuan penduduk;
- x. meningkatnya rasio tenaga paramedis per-satuan penduduk;
- y. meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan;
- z. meningkatnya jumlah posyandu purnama;
- aa. meningkatnya jumlah kawasan seni;
- bb. meningkatnya jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional (iku);
- cc. meningkatnya cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm);
- dd. meningkatnya jumlah wirausahawan baru;
- ee. menurunnya angka pengangguran terbuka;
- ff. meningkatnya kunjungan wisatawan;
- gg. meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat;
- hh. meningkatnya jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik;
- ii. meningkatnya jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik;
- jj. meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik;
- kk. meningkatnya jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari;
- ll. menurunnya jumlah daerah rawan banjir;
- mm. meningkatnya persentase pengangkutan sampah;

- nn. meningkatnya persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun;
- oo. meningkatnya persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan).

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Pasal 4

- 1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
- 2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				g Jumlah penghafal Quran	Jumlah penghafal Qur an yang dihasilkan pada tahun berjalan	Orang	NA	755	831	914	1.005	1.105	1.216
				h Prestasi lomba keagamaan tingkat provinsi Jawa Barat	Perolehan peringkat MTQ tingkat Provinsi	Peringkat	peringkat ke 6	Lima besar	Lima besar	Lima besar	Lima besar	Lima besar	Lima besar
				i Jumlah kasus konflik yang bernuansa agama (IKU)	Ada atau tidak adanya kejadian konflik agama	Kasus		6	6	5	5	4	4
	2 Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan	Meningkatkan derajat SDM yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan	1 terwujudnya pelayanan pendidikan untuk semua	a Peningkatan indeks pendidikan		%			80.33-81.60	81.67-82.93	83.00-84.27	84.33-85.60	85.67-86.67
				b Angka Melek Huruf (AMH) pada penduduk usia 15 tahun keatas (pp6)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yg buta huruf dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	%	93,52	93,89	94,26	94,63	95	95,37	95,74
				c Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	7,01	7,18	7,35	7,52	7,69	7,86	8,03
				d Angka Partisipasi Kasar (APK)		%	109,2	111	114	118	122	126	130
				- SD/MI		%	110,62	110,52	110,41	110,31	110,21	110,11	110,00
				- SMP/MTs		%							

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
							Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
				- SMA/MA		%	78,58	79,06	79,54	80,02	80,05	80,98	81
				e Angka Partisipasi Murni (APM)									
				- SD/MI		%	99,90	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96
				- SMP/MTs		%	89,30	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,50
				- SMA/MA		%	59,88	60,39	60,84	61,32	61,8	62,28	62,76
				- SMK		%	45,95	46,45	46,95	47,45	47,95	48,45	48,95
				f Rasio ketersediaan sekolah terhadap jml penduduk per usia tingkatan sekolah									
				- SD	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap Jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 tahun)	%	48	48	48	49	49	50	50
				- SMP	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMP (13-15 tahun)	%	17	17	18	18	19	19	20

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				- SMA dan SMK	Jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun)	%	19	19	19	20	21	22	23
		2 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	a	Angka Harapan Hidup (AHH)		Tahun	65,52		65,98	66,12	66,25	66,38	67
			b	ratio Kematian Ibu	Jumlah ibu melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan	Point		103,61	95,92	90,61	85,38	81,33	76,29
			c	ratio Kematian Bayi	Jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi	Point	4,87	4,36	4,17	4,06	3,96	3,92	3,810
			d	Balita gizi buruk (BB/TB)	Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang	%			1,09	0,97	0,85	0,73	0,61

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				e cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar	jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan	orang	1.115.865	1.115.865	1.345.865	1.345.865	1.345.865	1.345.865	1.345.865
				g Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,052	0,056	0,055	0,054	0,054	0,053	0,052
				h Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Cirebon	%	0,058	0,027	0,027	0,055	0,055	0,054	0,053
				i Jml puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan		Unit	-	-	57	57	57	57	57
				k Rasio dokter terhadap penduduk	Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	0,144	0,143	0,142	0,140	0,139	0,138	0,137

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				1 Rasio paramedis terhadap penduduk	Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon	%	1,389	1,422	1,454	1,485	1,516	1,545	1,574
				m presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten Cirebon	%	1.115.000	1.115.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
				n Jumlah Posyandu Purnama	akumulasi jumlah posyandu setiap tahun	Unit	384	384	461	538	615	692	769

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			3 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, berketrampilan, dan berjiwa kewirausahaan	a Jumlah kawasan seni	Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul, Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)	Kawasan	-	-	-	-	1		1
				b Jumlah pertunjukan/pagelaran/festival budaya tingkat nasional (iku)		Kali				1	1	1	1
				c Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	74.41%	50%	55%	60%	65%	70%	75%

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	%	25%	50%	55%	60%	65%	70%	75%
					Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	60.40%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
					Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100%	40%	45%	50%	60%	70%	75%
					Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.	%	67.23%	40%	45%	50%	50%	55%	60%
					Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	44.25%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
					Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan.	%	40.45%	40%	45%	50%	55%	60%	65%

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			d Jumlah wirausahawan baru		Wirausaha baru setiap tahun	Orang			100	100	100	100	100
			e Angka pengangguran terbuka		Jumlah Pengangguran terbuka tiap tahun	%	9,9	9,7	9,5	9,3	9,1	8,9	8,7
		4 Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah wisata berbasis budaya	a Meningkatnya kunjungan wisatawan		Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun	%			10	10	10	10	10
		5 Terwujudnya peningkatan peran pemuda dan prestasi Olahraga	a prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat		Peringkat prestasi olahraga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat	peringkat							
						- POPDA	10	10		9		8	
						- PORDA	22	15				14	
	3 Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia	Mendorong pemerataan pembangunan sektoral dan kewilayahan	1 Peningkatan koneksitas antar wilayah	a Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Akumulasi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Kilometer		446,64	509,14	551,44	594,44	626,44	646,65
				b Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik		Kilometer		328,21	359,91	389,91	419,91	449,91	468,07

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			2 Terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai	a jaringan irigasi:									
				- panjang saluran induk	akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik	km		54,218	58,995	63,772	68,548	73,325	78,102
				- panjang saluran sekunder	akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik	km		28,467	30,666	32,866	35,065	37,262	39,464
				- Bangunan jaringan irigasi	Prosentase bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	NA	NA	50	60	70	90	100
				c jumlah rumah tangga berakses air minum untuk keperluan sehari-hari	akumulasi RT yang terlayani air bersih	Rumah tangga	67.122	67.122	84.400	102.100	118.620	150.320	210.700
				d jumlah daerah rawan banjir		kec	12	10	8	6	4	2	-

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				f prosentase pengangkutan sampah	Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampahan	%		27%	32%	37%	42%	47%	52%
				g Persentase penduduk yg terlayani sistem jaringan drainase Skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Jumlah kumulatif penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota.	%		25%	30%	35%	40%	45%	50%
				h Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan persampahan)	Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayanai melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk	%		42%	39%	36%	33%	30%	20%

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				i Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.	%	59,7%	63%	67%	71%	75%	79%	84%
				j Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)	Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya	Pos jaga	9	9	9	10	12	13	14
			3 Terwujudnya Cirebon yang bersih, Asri dan lestari	a Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri	Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R	Kelompok	NA	3	7	8	8	8	8
				b Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kecamatan yang memiliki RTH ≥ 1 Ha	Kec		1	3	10	20	30	40

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				c Prosentase kawasan lindung		%	NA	NA	30	30	30	30	30
				d Penghargaan Adipura	piala adipura	Kali		1	1	1	1	1	1
				e Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air	sungai yang dipantau kualitas airnya	Sungai		5	5	5	5	5	5
				f Jumlah industri yang memenuhi kualitas baku mutu udara	industri yang mempunyai cerobong asap	Industri		0	5	10	15	20	25
				g Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan	pengaduan yang menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan	pengaduan		12	12	12	12	12	12
	4 Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik dan komuniti)	Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	1 Terwujudnya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	a Jumlah komunitas		Komunitas		70	75	80	85	90	92
				b Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		Kelompok		70	75	80	85	90	92
				c Jumlah lembaga ekonomi pedesaan		Lembaga			84	169	254	339	424

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	5 Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram	Meningkatkan pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1 Terwujudnya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat	a Nilai PDRB	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp (dlm juta)	9.403.633	9.900.215	10.419.976	10.972.236	11.559.249	12.183.449	12.847.447
				b Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	%	5,07	5,20	5,35	5,40	5,45	5,50	5,55
				c PDRB per kapita	Bersumber dari BPS Kab. Cirebon	Rp	11.639.000	13.398.988	14.765.489	16.210.302	17.811.979	19.590.887	21.568.345
				d Tingkat inflasi	Data inflasi merujuk pada tingkat inflasi Kota Cirebon	%	3,03	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5	3,5-4,5
				e Jumlah daerah rawan pangan		Desa	13	12	11	10	9	8	7
				f Nilai investasi	Investasi yang terdaftar di BPPT	Rp (juta)	744.765	756.250	853.192	981.171	1.128.347	1.297.599	1.492.239

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
				g Prosentase Koperasi aktif	prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada		86,42	88,42	91,00	94,00	97,00	100,00	
				h Jumlah lokasi wisata kuliner di kecamatan		Lokasi		8	8	8	8	8	
			2 Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih berkualitas	a Menurunnya Jumlah penduduk miskin	Prosentase penduduk miskin setiap tahun	%	14,47	14,00	13,53	13,06	12,59	12,12	11,65
				b Meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk			99,50	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6 Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Mewujudkan reformasi sistem birokrasi	1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima	a Indeks Kepuasan Masyarakat	Skala 1-5		3,50	3,63	3,75	3,88	4,00	4,13	4,25
				b Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan SOP dan SPM		unit		4	5	6	7	9	11
				c Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	Terdapat 120 indikator kinerja				1	10	20	30	40
			2 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	a Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai		%		2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7

VISI	MISI	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Data eksisting		Target Capaian				
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			3 Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih	b Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi/ latar pendidikan		%		80%	85%	90%	95%	100%	100%
				a Rata-rata capaian kinerja SKPD		%	40	45	50-55	55-60	60-70	65-70	70-75%
				b Penilaian RAD Pencegahan Penanggulangan Korupsi (PPK)			kurang	kurang	cukup	baik	baik	baik	baik
				c Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal		%	-	-	2	3	3	4	5
				d Peningkatan Pendapatan asli daerah		%	-	-	15	15	15	15	15

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 18 , SERI E.13